**DAFTAR PUSTAKA**

* 1. **Buku**

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Ali, Faried. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. (Bandung: Refika Aditama, 2012).

Aminanto, Kif. *Supremasi Hukum Menuju Kehakiman Yang Merdeka*. (Jember: Katamedia, 2017).

Atmakusumah, Maskun Iskandar dan Warief Djajanto Basorie (ed.), *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996).

Bengen, Dietriech G. *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut*, *Sinopsis.* (Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, 2001).

Bruggink, JJH. *Refleksi Tentang Hukum*. diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti).

Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).

FGB-ITB. *Pandangan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung Terhadap Reklamasi Pantai Utara Provinsi DKI Jakarta*. (Bandung: Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (FGB-ITB), 2016).

Fuller, Lon. *The Morality of Law*, Revisi Edition, (Yale: Yale University, 1964).

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseacht*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1989).

Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Ke-11. (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2011).

Hamidi, Jazim. *Penerapan AAUPPL di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Hasni. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Ismail, Nurhasan. *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik*. (Yogyakarta: Huma dan Magister Hukum UGM, 2008).

Kartayasa, Mansur. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia*. Edisi Pertama. (Jakarta: Kencana, 2017).

Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. (Bandung: Alumni, 2000).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11. (Jakarta: Kencana, 2011).

Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. (Salatiga: Griya Media, 2011).

Mustopadidjaya. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. (Jakarta: LAN, 2002).

Nugraha, Safri. *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik*. (Jakarta: BPHN, 2007).

Pound, Roscoe. *An Introduction to The Philisophy of The Law*. (New Haven: Yale University Press, 1978).

Pratiwi, Cekli Setya, dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: JSSP, 2016).

Qamar, Nurul. *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Cetakan Pertama. (Makasar: Refleksi, 2010).

Radbruch, Gustav. *Einfuehrug In Die Rechtswissenschaft.* (Stuggart: Koehler Verlag, 1961).

Raharjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Penerbit Kompas, 2006).

\_\_\_\_\_\_\_. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. (Jakarta: UKI Press, 2006).

\_\_\_\_\_\_\_. *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*.(Jakarta: Kompas, 2007).

\_\_\_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010).

Rasyidi, Lili dan B. Arief Sidharta. *Filsafat Hukum: Mazhab dan Felkeksinya*.(Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994).

\_\_\_\_\_\_\_\_. dan Ira Tania Rasyidi. *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).

Rawls, Jhon. *The Theory of Justice*. (Cambridge Massachustes: Harvard University Press, 1972).

Rokhmad, Abu. *Hukum Progresif Pemikiran Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Teori Maslahah*. Cetakan ke-1. (Semarang: Program Pascasarjana IAN Walisongo dan Pustaka Rizky Putra, 2014).

Rochadiyat, Yayat (ed.). *Jakarta Dalam Angka 2016*. (Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2016).

Santoso, Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Sutedi, Adrian. *Buku Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik*. (Jakarta: CAPS, 2012).

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra NK, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dan Perkara Pidana*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Yulikhsan, Eri. *Keputusan Diskresi Dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi Dalam PTUN)*. (Yogyakarta: Depublish, 2016).

* 1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur menetapkan Pantura sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional*.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Undang-Undang [Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/12622/nprt/539/uu-no-28-tahun-2002-bangunan-gedung?PHPSESSID=gobsu4im7q29f0mhlt77s3prj1), (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247).*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, menetapkan Pantura Jakarta sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP).*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung*.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_.* Keputusan Gubernur Nomor 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju, dan Kawasan Pantai Bersama Kota Administrasi Jakarta Utara.

* 1. **Jurnal**

Huda, Moch. Choirul. “Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Perspektif,* Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, hal. 126.

### Ridwan. “Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif”, *Jurnal Hukum Projustisia*, April 2009 Vol. 27 No.1, hal. 69.

### Qodriyatun, Sri Nurhayati. “Reklamasi Teluk Jakarta, Perlukah Dilanjutkan?”, *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, Vol. IX, No. 20/II/Puslit/Oktober/2017, hal. 2.

* 1. **Artikel/Internet/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi**

Asballah, Raja. “Hubungan Reklamasi Pantai dengan Komponen Perkembangan Kawasan”, *Tesis,* Program Studi MPKD, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2003.

Adzkia, Aghnia. “Bangunan Tanpa Izin di Pulau Reklamasi Bakal Disegel”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160413142957-20-123670/bangunan-tanpa-izin-di-pulau-reklamasi-bakal-disegel?, 18 Juli 2018.

Anonim, “Proyek 17 Pulau Buatan Jakarta Bakal Telan Dana Rp.300 Triliun”, https://finance.detik.com/berita\_ekonomi\_bisnis/d\_2635960/proyek\_17\_pulau\_buatan\_jakarta\_bakal\_telan\_dana\_rp\_300-triliun, diakses pada 18 Juli 2018.

Badan Pusat Statistik, Provinsi DKI Jakarta, “Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten dan Kpta di Provinsi DKI Jakarta 2010-2014”, Tahun 2018. https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/30/136/jumlah\_penduduk\_dan-laju\_pertumbuhan\_pen-duduk\_menurut\_kabupaten\_kota\_di\_provinsi-dki\_jakarta\_2010\_2014\_dan\_2015.html, diunduh 2 Desember 2018.

Bappenas, “Profil Pembangunan DKI Jakarta” (Online) http://simreg. bappenas.go.id/ document/ Profil/Profil %20Pembangunan%20 Provinsi%203100DKI%202013.pdf, 26 Agustus 2018.

BAPPEDA DKI Jakarta, “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daererah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022”, hal.II-1, https:// bappeda.jakarta.go.id/uploads/document/ 2018-07-12/65/65 RPJMD\_ DKI\_Jakarta\_2017-2022.pdf, diunduh 21 November 2018.

Damang. “Pengertian Perizinan”, http://www.negarahukum.com/hukum/ pengertian perizinan.html, diakses 8 Agustus 2018.

### Djakapermana, Ruchyat Deni. “Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan”, http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin /upload/data\_artikel/edisi4g.pdf, diakses 7 Desember 2018.

### Editotial, *“Ini Proyek Gede”, Majalah Review Weekly,* No.32 Tahun V, 11-17 April 2016.

### Editor, “Akhir Cerita Proyek Reklamasi”. https://nasional. sindonews. com/read/ 1341600/16/akhir-cerita-proyek-reklamasi-1538002941, diakses 27 Desember 2018.

Fathurrahman, Aditya. “Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta Sebagai Mesin Pertumbuhan Kota Jakarta, *Pojok Karya*, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI, 11 January, 2016, hal.1.

Hanifiyani, Mawardah Nur. “Alasan Ahok Tak Bongkar Bangunan di Pulau Reklamasi”, https://metro.tempo.co/read/762290/alasan -ahok-tak- bongkar-bangunan-di-pulau-reklamasi, diakses 18 Juli 2018.

### Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, “Laporan Tindak Lanjut GNP-SDA Indonesia Sektor Kelautan Semester I-Tahun 2016.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Jumlah Penduduk Indonesia Terbesar Keempat https://www.kemenkopmk.go.id/artikel/jumlah- penduduk-indonesia- terbesar-ke-empat-dunia-setelah-china-india-dan-amerika, diakses 2 Desember 2018.

Litbang Kompas. “Jalan Panjang Reklamasi Teluk Jakarta” http://megapolitan. kompas.com/read/2016 /04/04/10050401/Jalan.Panjang.Reklamasi.di.Teluk.Jakarta.dari.era.Soe-harto.sampai.Ahok, diakses 18 Juli 2018.

Mayasari, Irma. “Perspektif Hukum Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Dialog Publik Dengan Tema: Kebijakan Reklamasi, Menilik Tujuan, Manfaat, dan Efeknya”, *Makalah*, di Gedung KPK, Selasa, 04 Oktober 2016.

MD, Moh Mahfud. “Masih Soal Hukum Reklamasi”, (Online), https://profmahfud. wordpress. com /tag/hukum-reklamasi/, 17 Desember 2018.

Primasmoro, Muhammad Radityo, “Fakta Penyegelan Bangunan Pulau D Oleh Pemprov DKI”, https://www.liputan6.com/news/ read/ 3553759/4\_ fakta\_penyegelan\_pulau\_d\_oleh\_pemprov\_dki, diakses 18 Juli 2018.

Suhady, Idup. Kepemerintahan yang Baik, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II, Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia, 2009.

Retaduari, Elza Astari. “Disegel, Bangunan di Pulau D Seharusnya Dibongkar Sejak 2015”, https://news.detik.com/berita/3189274/ disegel-bangunan-di-pulau-d-seharusnya-dibongkar-sejak-2015, diakses 18 Juli 2018.

Santoso, E.B., H.Purwadio. “Dampak Reklamasi Pantai Terhadap Pemanfaatan Ruang Publik Dan Strategi Pengelolaannya Stu di Kasus : Kawasan Boulevard, Kota Manado”, *Tesis*, Institut Teknologi Surabaya, 2007.

Sudjatmiko, Edy. “Pakar: Jakarta Perlu Pembangunan Kawasan Utara”, http://www.antaranews.com/berita/587422/pakar-jakarta-perlu-pembangunan-kawasan-utara, diakses 18Juli 2018.

Ul Haq, Muhammad Fida. “Anies Ganti Nama Pulau Reklamasi, PDIP Ingatkan Aspek Legalitas”, https://news.detik.com/berita/4318840/ anies-ganti-nama-pulau-reklamasi-pdip-ingat- kan- aspek-legalitas, diakses 27 Desember 2018.

Yusuf, Asep Warlan. “Terkait Reklamasi, Pengembang yang Beriktikad Baik Harus Mendapatkan Insentif Ruang“, (Online), http://properti. kompas.com/read/2016/04/13/230000821/Terkait.Reklamasi.Pengem- bang.yang.Beriktikad.Baik.Harus.Mendapatkan.Insentif.Ruang, 19 Desember 2018).

### Wantu, Fence M. “Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata”, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2011.

### Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005).

Hadiwiyono, Eko. *Kamus Bahasa Indonesiai Lengkap.* (Jakarta: Akar Media, 2017).

Rudiyat, Charlie. *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap. (Jakarta: Pustaka Mahardika, tanpa tahun).

Termorzhuizen, Marjanne. *Kamus Bahasa Belanda-Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2002).